

Implementasi Kebijakan dalam Modernisasi Pesantren Darussalam Blokagung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Formal di Pesantren

Mar Syahid

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: marsyahid00@gmail.com

Abstrak Terdapat tiga poin penting dari hasil akhir dan kesimpulan dalam penelitian ini yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu: Pertama, mengkaji model kebijakan yang diterapkan oleh Yayasan Pesantren Darussalam Blokagung. Kedua, mereview proses aplikasi, serta efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan di Yayasan Pesantren Darussalam. Kedua poin di atas dianalisis untuk menghasilkan konsep yang lengkap terkait kebijakan dalam modernisasi yang diterapkan di Yayasan Pesantren Darussalam. Hasil analisis tersebut memberikan landasan konseptual bagi pengembangan teori kebijakan pesantren dalam mengembangkan lembaga pendidikan formal. Tujuannya untuk poin selanjutnya, Ketiga, merumuskan prototipe kebijakan pondok pesantren yang dapat diterapkan di Yayasan Pondok Pesantren lain yang mendirikan atau mengembangkan pendidikan formal dari SD / MI ke Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan Islam dan ilmu umum yang diakomodasi oleh pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Modernisasi Pesantren, Perkembangan Pendidikan Formal

Abstract There are three essential points from the final results and conclusions in this research that combines qualitative and quantitative approaches, namely: First, examining the policy model applied by the Darussalam Blokagung Islamic Boarding School Foundation. Second, reviewing the application process, as well as the effectiveness and efficiency of policy implementation at the Darussalam Islamic Boarding School Foundation. The two points above are analyzed to produce a complete concept related to policies in modernization which are applied at the Darussalam Islamic Boarding School Foundation. The results of the analysis provide a conceptual basis for developing the theory of pesantren policies

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

in developing formal educational institutions. The goal is for the next point, Third, to formulate a prototype of a boarding school policy that can be applied at other Pondok Pesantren Foundations that establish or develop formal education from SD / MI to Higher Education (PT). Education that integrates Islamic knowledge and general knowledge which is accommodated by the Indonesian government.

Keywords: Policy Implementation in Pesantren Modernization, Its Relevance for Formal Education Development

PENDAHULUAN

Kehadiran Sri Sultan Hemengkubuwono IX pada pertemuan IGGI (*Intergovernmental Group on Indonesia*) di Amsterdam tanggal 20 Februari 1967 menjadi tonggak awal realisasi pembangunanisme (*developmentalism*). Sebuah narasi besar pemerintah Orde Baru yang secara konseptual diadopsi dari teori pertumbuhan ekonomi Rostow yang dituangkannya dalam *The Stages of Economic Growth*.¹ Pembangunanisme ini diorientasikan untuk mentransformasikan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menjadi penanda pragmatis orientasi pembangunan tersebut. Kata modern yang menyipati kata masyarakat (masyarakat modern) menjadi slogan semantis pembangunanisme yang mengkultuskan kemajuan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan bahkan pemahaman keagamaan. Kata itu dalam perkembangannya menjadi slogan populer yang digunakan dalam percakapan harian masyarakat Indonesia untuk menyipati hal-hal yang diasumsikan bernilai tinggi, peka jaman, berkemajuan, dan bergengsi.

Deras laju pembangunanisme pemerintah Soeharto menuntut modernisasi berbagai bidang, dan salah satu tuntutan yang sangat dirasakan perubahannya oleh umat Islam sejak tahun 1970an adalah modernisasi pendidikan keagamaan, spesifiknya modernisasi pesantren. Setiap pesantren dalam konteks ini dituntut untuk memperluas cakupannya bukan hanya sebagai wahana penanaman doktrin Islam dan pendidikan ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga sebagai pusat

¹ Rostow, E.E. *The Stages of Economic Growth*. (Cambridge University Press.1960), 12

pengembangan teknologi tepat guna, pusat penyuluhan kesehatan masyarakat dan kelestarian ekologi, serta wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.² Salah satu langkah praktis yang dilakukan oleh para ulama pesantren – kendati sebagian menolak modernisasi pesantren – untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah dengan mendirikan pendidikan formal yang model dan kurikulum pendidikannya menggantikan model tradisional (*salaf*).

Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi merupakan salah satu pesantren di Jawa Timur yang tanggap terhadap modernisasi pesantren yang digalakan pemerintah Orde Baru. Seperti diketahui khalayak, pesantren yang didirikan oleh KH. Mukhtar Syafa'at pada tanggal 15 Januari 1951 itu pada awalnya merupakan pesantren tradisional yang menanamkan doktrin Islam dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada umat secara *sorogan*, *bandongan*, dan *halaqahan*. Kepekaan dan respon solutif terhadap kebutuhan dan ragam problematika kehidupan umat yang tumbuh dari pendiri dan para ulama yang berjuang bersamanya menstimulus mereka untuk mengembangkan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dengan cara memodernisasi pesantren. Langkah kongkrit dari modernisasi pesantren itu diwujudkan dengan pendirian lembaga pendidikan formal – mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT) – yang berada dalam naungan manajemen Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. Lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu umum yang diakomodasi pemerintah.

Modernisasi pesantren dalam prakteknya harus diimbangi dengan kebijakan modern agar modernisasi pesantren yang dilakukan melalui pendirian sekolah formal berjalan dan berkembang sesuai dengan visi dan misi Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung serta program-program strategis pemerintah, khususnya dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Manajemen modern yang dimaksud adalah manajemen transparan, akuntabel,

² Masyhud, M., Sulthon, *Manajemen Pondok Pesantren*. (Jakarta: Diva Pustaka. 2003), 9

efektif dan efisien yang dikendalikan oleh kepemimpinan distributif, bukan semata-mata bertumpu pada karisma ulama. Kepemimpinan distributif dalam mengimplementasikan kebijakan menjadi penting karena polece, seperti diungkapkan Marry Parker Pollet.³ adalah “*The art of getting things done through the others*”. Implementasi kebijakan modern yang dikendalikan oleh kepemimpinan distributif mutlak diperlukan karena setiap lembaga pendidikan (sekolah) formal yang didirikan dalam naungan manajerial Yayasan Pondok Pesantren Darussalam selayaknya diberi keleluasaan pengelolaan atau independensi manajerial yang dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial organisasi.

Ragam lembaga pendidikan formal – mulai SD/MI hingga Perguruan Tinggi – yang didirikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan hingga saat ini terus eksis dengan respon positif dari masyarakat menunjukkan bahwa modernisasi pesantren berhasil dilakukan. Tidak seperti pesantren lainnya yang acapkali redup pasca wafat pendirinya atau kehilangan santri karena bertahan dengan model pendidikan ketradisionalannya, pesantren Darussalam justru sebaliknya, mampu eksis dan bahkan menjadi salah satu *trendsetter* pondok pesantren di Jawa Timur, terkhusus kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut tentunya diraih dengan konsistensi perjuangan pendiri dan para ulama penerusnya dalam menegakkan doktrin Islam yang ditunjang oleh efisiensi dan efektivitas manajemen Yayasan. Efisiensi dan efektivitas manajemen itulah yang menopang Yayasan dalam menghadapi, menyelesaikan ragam rintangan, dan mengatur ragam lembaga pendidikan di bawah naungannya. Kemampuan Yayasan dalam mengaplikasikan kebijakan yang efektif dan efisien itulah yang oleh masyarakat disinyalir sebagai faktor signifikan keberhasilan Yayasan Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi berhasil dalam modernisasi pesantrennya.

³ Akib Haedar, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Imiah Univesitas Indonesia. Administrasi Publik, No. 1 Februari 2011:1-11

Kebijakan modern yang diaplikasikan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dalam mendirikan dan mengembangkan ragam lembaga pendidikan formal patut ditelaah secara akademis. Tujuannya bukan semata-mata untuk menelaah model, proses pengaplikasian serta efektivitas dan efisiensi manajemen modern yang diaplikasikan di Yayasan tersebut, tetapi juga untuk melihat bagaimana dan sejauh mana dalam kebijakan tersebut bisa dikembangkan secara teoritik dan bisa diaplikasikan untuk pengembangan lembaga pendidikan formal di Yayasan Pondok Pesantren lain. Hal itu semua menjadi alasan inti kenapa penelitian ini urgen dilakukan.

REVIEW LITERATUR

Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)” istilah implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan.⁴

Model-model implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier model ini disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) membagi tiga variable; a). Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, b). Kemampuan keputusan menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dan c). Pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat keputusan kebijakan tersebut.

⁴ Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hal.145

Model implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edwards III yang dikutip Winarno.⁵ adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy* dan modal kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn yang dikutip Wahab “perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan”.⁶

Kajian manajemen sebagai khazanah ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi umumnya terkait dengan perusahaan *profitable* atau lembaga-lembaga pemerintah. Pengembangan implementasi kebijakan dalam lembaga pendidikan secara teoritik masih tergolong baru, terlebih dalam lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Kebijakan pesantren dalam pengembangan lembaga pendidikan kurang mendapat apresiasi dari akademisi, karenanya kajian terhadapnya masih minim. Salah satu alasan kenapa manajemen pesantren kurang menarik untuk ditelaah adalah karena asumsi dominan yang berkembang di komunitas akademisi manajemen pesantren bertumpu pada otoritas dan spontanitas ulama sehingga cenderung dinilai tidak profesional, tertutup, dan sulit diakses. Asumsi itu pula yang menjadikan kajian terhadap manajemen pesantren Darussalam Blokagung dalam pengembangan lembaga pendidikan formal di dalam naungannya – sedangkal penelusuran penulis – belum ditemukan. Ketiadaan hasil penelitian menjadi alasan kenapa penelitian ini urgen dilakukan. Tidak hanya itu, ketiadaan itu pula yang mengukuhkan orisinalitas atau keautentikan penelitian ini.

Tujuan proses modernisasi pondok pesantren adalah berusaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan Islam yang ada di pesantren. Akhir-akhir ini, pondok pesantren mempunyai kecenderungan – kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini digunakan. Perubahan-perubahan yang bisa dilihat di pesantren modern diantaranya mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, lebih terbuka atas perkembangan diluar dirinya, diverifikasi

⁵Ibid.174

⁶ Wahab, *Teori Van Meter dan Van Horn* (Jakarta: Suara Bebas, 2008), 78

program dan kegiatan dipesantren mangkin terbuka dan luas, dan sudah dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.

Sistem pendidikan menurut Mastuhu adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsure-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi cita-cita bersama para pelakunya.⁷ Unsur-unsur asasi pendidikan adalah: (1) pendidikan: Islam, sebab islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sempurna menurut keyakinannya serta dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Karena sistem pendidikan pondok pesantren merupakan bagian (sub system) saja dari pendidikan islam, maka asasnya pun adalah islam; (2) tujuan: tujuan akhir (*ultimate goal*), merupakan tujuan akhir dari tujuan setiap muslim yaitu mencapai ridho Allah, dan tujuan umum (*institutional*) ialah sama dengan tujuan diciptakan umat manusia di dunia ini, yaitu mengabdikan kepada Allah, dan tujuan khusus (kurikuler) adalah sesuai dengan fungsi didirikannya lembaga pendidikan pondok pesantren berfungsi untuk melahirkan calon ulama' dan ahli agama namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya pendidikan formal didalam pesantren modern saat ini banyak lulusan pesantren yang menduduki strategis dipemerintahan bahkan menjadi pemimpin bangsa ini.

Sistem pendidikan pesantren juga terdiri atas unsur-unsur dan nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan. Kualitas dari dinamika suatu system pendidikan pesantren sangat tergantung pada kualitas para pengasuhnya dan bobot interaksi antara unsur dan pelaku pesantren yang ada. Pada dasarnya setiap lembaga pendidikan selalu menghendaki agar kualitas dan kuantitas berjalan seiring dan seimbang, sehingga tidak mengalami permasalahan yang krusial. Untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan kesiapan pesantren baik dari sisi internal maupun eksternal.⁸

METODE PENELITIAN

⁷ Nata Abudin. *Sosiologi Pendidikan Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), 34

⁸ Ibid, hal. 23

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memadukan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Pendekatan kualitatif tertuju pada pengungkapan *neumena* atau faktor penyebab sesuatu dari data non-numerik, dan pendekatan kuantitatif tertuju pada pengungkapan fenomena dari data numerik. Proses penelitian ini secara teknis mendahulukan pendekatan kualitatif karena hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif diorientasikan untuk memperkuat hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Selanjutnya, penekatan kualitatif adalah apabila seseorang melakukan penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu, digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian, walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data tidak terbatas.⁹

Penentuan subjek atau sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sample* yang dalam konteks ini terdiri dari ketua yayasan, pengasuh pondok, kepala lembaga pendidikan mulai dari SD/MI hingga Perguruan Tinggi (PT), ulama, guru, dosen, santri, dan masyarakat. Sampel yang terdiri dari ulama, guru, dosen, santri, dan masyarakat jumlahnya ditentukan dari jumlah populasi dengan menggunakan rumus Slovin dimana derajat $e = 0,10$ (batas kesalahan yang tidak melampaui 10 %), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Sedangkan pada analisis data dilakukan dengan dua cara, analisis hermeneutik fenomenologis dan analisis statistik. Analisis hermeneutik fenomenologis dilakukan untuk data non-numerik. Analisis ini tertuju pada pengungkapan *neumena* atau faktor penyebab sesuatu. Langkah praktis dari analisis hermeneutis ini adalah melakukan pengklasifikasian,

⁹ Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press.2001), hal.29

pemahaman, penafsiran dan pendeskripsian data sesuai dengan objek penelitian.¹⁰ Adapun analisis statistik dilakukan untuk data numerik. Analisis statistik tertuju pada pengungkapan fenomena sesuatu. Langkah praktis dari analisis kuantitatif ini adalah tabulasi data (penentuan skor setiap item, penjumlahan seluruh skor item, penyusunan ranking skor, dan perubahan data), menganalisis data melalui rumus statistik, dan pengujian hipotetis secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan.

Pada dasarnya implementasi kebijakan harus berjalan efektif agar penerima kebijakan dapat merasakan sesungguhnya dampak dari adanya suatu kebijakan tersebut. Menurut Nugroho¹¹ bahwa dalam hal keefektipan implementasi kebijakan terdapat empat ketepatan yang harus di penuhi, yaitu: kebijakan tersebut apakah sudah tepat, tepat pelaksanaan, tepat tarjet dan tepat lingkungan.

Kebijakan modern yang diaplikasikan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dalam mendirikan dan mengembangkan ragam lembaga pendidikan formal patut ditelaah secara akademis. Tujuannya bukan semata-mata untuk menelaah model, proses pengaplikasian serta efektivitas dan efisiensi manajemen modern yang diaplikasikan di Yayasan tersebut, tetapi juga untuk melihat bagaimana dan sejauh mana dalam kebijakan tersebut bisa dikembangkan secara teoritik dan bisa diaplikasikan untuk pengembangan lembaga pendidikan

¹⁰ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta. 2008),

¹¹ Nugroho, *Kebijakan Publuk untuk Negara berkembang; Model-model Perumusan, Imlementasi, dan Evaluasi*. (Jakarta. PT. Elex Media. 2006) hal. 137-139

formal di Yayasan Pondok Pesantren lain. Hal itu semua menjadi alasan inti kenapa penelitian ini urgen dilakukan.

Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung

Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Darussalam merupakan pesantren yang menerapkan pola pendidikan pesantren kombinasi. Pola pendidikan pesantren kombinasi, menyatukan sistem pendidikan pesantren modern dan tradisional/*salafiyah*. Menurut Dhofier¹² pesantren dengan pola tersebut adalah pesantren tipe baru, seperti Pesantren Tebuireng dan Rejoso di Jombang, telah membuka SMP dan SMA, dan Universitas. Begitu juga pada Yayasan Pendidikan Islam HM. Tribakti (YPIT) yang kini menjadi Pesantren al-Mahrusiyah dan Pesantren Salaf Terpadu ar-Risalah, sebagai unit pengembangan pesantren Lirboyo Kediri, selain tetap mempertahankan sistem pendidikan pesantren tradisional (*salaf*), juga membuat membuka sistem pendidikan umum sebagai cabangnya di luar pondok induk.¹³ Sementara itu, Menurut Zuhdi contoh pesantren yang memadukan sistem pendidikannya, seperti Pesantren Darussalam Blokagung, Jawa Timur adalah sebuah sistem pendidikan kombinasi, dengan memperbaiki sistem pendidikannya, yang semula sebagai pesantren tradisional menjadi pesantren yang mengkombinasikan antara pesantren tradisional dengan sistem sekolah dan madrasah, yakni: (a) **Sekolah**: disediakan bagi santri/peserta didik yang berminat mempelajari pengetahuan non agama; (b) **Madrasah**: disediakan bagi santri/peserta didik yang berminat memperdalam pengetahuan agama. Selain sekolah dan madrasah juga, mempertahankan pendidikan pesantren tradisional setelah jam sekolah/madrasah.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren yang mengembangkan model

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), cet. Ke-11, hlm. 76.

¹³ Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. ke-, hlm.101.

pendidikan pesantren kombinasi tentunya terdapat kelebihan dan kelemahan dari beberapa sisi. Kelebihan pada pesantren dengan pola/model pendidikan kombinasi ini, yaitu:

1. Memungkinkan santri melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya dapat ditempuh di lembaga yang sama sehingga untuk jenjang pendidikan diniyah dan *ma'hadiyah* tetap bisa dilanjutkan.
2. Lulusan pada pesantren kombinasi memiliki peluang untuk dapat memiliki berbagai profesi baik dibidang keagamaan maupun non keagamaan, seperti guru/dosen, pengasuh pesantren, Insinyur, dokter, pengacara, ekonom, dan akuntan. tentunya memiliki nilai tambah yakni memiliki modal pemahaman keagamaan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga pendidikan non keagamaan.
3. Lulusan pesantren kombinasi lebih dapat menyeimbangkan kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) karena ketiga jenis kecerdasan tersebut dikembangkan dan diasah bersamaan.

Menurut Azra,¹⁴ Pesantren jenis kombinasi dapat mengakomodasi hampir keseluruhan harapan masyarakat secara sekaligus pada pesantren.

Harapan Pertama dan utama adalah agar pesantren tetap menjalankan peran krusialnya dalam tiga hal pokok. 1. Transmisi ilmu- ilmu dan pengetahuan Islam (*Transmissions of Islamic Knowledge*) 2. Pemeliharaan tradisi Islam (*Maintenance Of Traditions*) 3. Reproduksi calon- calon ulama (*Reproduction of Ulama*).

Harapan kedua agar para santri tidak hanya mengetahui ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Dengan demikian santri juga berperan dalam mobilitas pendidikan.

Harapan ketiga agar para santri memiliki keterampilan, keahlian, atau life skills

¹⁴ Azyumardi, Azra. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) cet I, hlm 136.

khususnya dalam bidang sains dan teknologi yang menjadi karakter dan ciri masa globalisasi. Sehingga mereka memiliki dasar *competitif advantage* dalam lapangan kerja.

Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung

Pesantren Darussalam terus berinovasi untuk mengembangkan kurikulum pendidikannya. Pesantren Darussalam melakukan beberapa langkah dalam melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan baik yang bersifat *ma'hadiyah* maupun pendidikan formal. Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang dilakukan Pesantren Darussalam, jika merujuk pada model pengembangan yang dirumuskan oleh ahli kurikulum, model pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Pesantren Darussalam merupakan perpaduan antara model *Top-Down* dan *Grass Root*, namun dalam prakteknya kurikulum pesantren Darussalam lebih cenderung mirip dengan model yang dikembangkan Beauchamp.

Pengembangan model *Grass-Root* merupakan model pengembangan dimana inisiatif datang dari bawah, yaitu guru-guru dan pihak sekolah. Model ini berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Dalam model ini seorang guru atau sekelompok guru di suatu lembaga mengadakan suatu usaha pengembangan kurikulum baik berkenaan dengan komponen kurikulum ataupun suatu bidang studi.

Jika berjalan dengan lancar model ini akan lebih baik dengan pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya.

Sementara model Beauchamp sebagaimana dikutip oleh Sukmadinata terdapat langkah-langkah dalam melakukan pengembangan kurikulum di antaranya yaitu:¹⁵

¹⁵ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 322-325

1. Menetapkan arena atau ruang lingkup wilayah yang dicakup oleh kurikulum tersebut, dalam hal ini kurikulum dikembangkan mencakup satu lembaga pendidikan, yaitu Pesantren Darussalam.
2. Menetapkan personalia, dalam hal ini Pesantren Darussalam menentukan anggota dalam rapat yang terdiri atas beberapa personel yang berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pesantren (Pihak Yayasan/dewan pengasuh/kyai) dan ustadz-ustadzah sesuai keahlian pada bidang/mata pelajaran masing-masing, seperti ahli dalam pembelajaran al-Qur'an, ahli dalam pembelajaran kitab *salaf*, yang kemudian disetujui oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Pesantren Darussalam dalam menentukan personel dalam tim pengembangan kurikulum keagamaan/kepesantrenannya hanya melibatkan tim ahli pendidikan dan guru-guru tingkat lokal pesantren saja yang tentunya sudah berpegalaman dibidang pendidikan dan pesantren, yang sebelumnya telah melakukan studi banding dengan beberapa pesantren.
3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Tahapan ini dilaksanakan dengan:
 - a. Membagi tim berdasarkan bidang dan keahlian, terdiri dari para ustadz-ustadzah, kepala bidang dan ketua asrama, Dewan Pengasuh, Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Yayasan Islam Darussalam, Kepala Bidang SDM dan beberapa ahli yang berpengalaman sesuai bidangnya, seperti ahli dalam bahasa Arab, ahli dalam kitab kuning (*salaf*) serta ahli dari ilmu al-Qur'an. Kemudian membagi para peserta rapat kerja tersebut dalam beberapa bagian atau komisi.
 - b. Mengadakan penilaian terhadap kurikulum yang sedang digunakan, setelah itu meneliti apa saja yang menjadi kekurangan dari kurikulum yang sedang digunakan untuk selanjutnya memberikan masukan berupa beberapa usulan dari masing-masing komisi untuk bahan pertimbangan bagi pelaksanaan kurikulum selanjutnya.
 - c. Merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru,

selanjutnya masing-masing tim yang terbagi menjadi beberapa komisi di atas menentukan program-program masing-masing. Program-program tersebut berupa program kegiatan semester/tahunan, pedoman proses pembelajaran, dan pedoman penilaian hasil belajar.

- d. Setelah menentukan program-program sesuai bidang masing-masing, pada masing-masing program tersebut di rumuskan komponen-komponen kurikulum, yaitu:
 - 1) Merumuskan tujuan pembelajaran
 - 2) Memilih materi/isi: dengan menentukan kitab-kitab yang digunakan dalam setiap jenjang dan tingkat pendidikan, dan menyusun silabus pembelajaran, dan menentukan batasan-batasan pencapaian minimum materi pembelajaran
 - 3) Menentukan pengalaman belajar
 - 4) Menentukan strategi atau metode pembelajaran pada masing-masing bidang
 - 5) Menentukan kriteria evaluasi/penilaian hasil belajar.
 - 6) Penulisan dan penyusunan kurikulum baru.
 - 7) Implementasi Kurikulum. Kurikulum yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan sesuai keputusan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Ada tiga poin esensial dari hasil akhir dan kesimpulan dalam penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini, yaitu: *Pertama*, menelaah model kebijakan yang diaplikasikan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung. *Kedua*, Meninjau bagaimana proses pengaplikasian, serta efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Dua poin di atas dianalisis sehingga menghasilkan suatu konsep utuh terkait kebijakan dalam modernisasi yang diaplikasikan di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Hasil analisis itu menjadi landasan konseptual untuk pengembangan teori kebijakan-kebijakan pesantren dalam pengembangan

lembaga pendidikan formal. Tujuannya untuk poin selanjutnya, *Ketiga*, merumuskan prototipe kebijakan pondok pesantren yang bisa diaplikasikan di Yayasan Pondok Pesantren lain yang mendirikan atau mengembangkan pendidikan formal mulai SD/MI hingga Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu umum yang diakomodasi oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Akib, Haedar (2010) Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1):1-11
- Bungin, B. 2001, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Edword, Geogre. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Hanafi, M., Mamduh. (2001). *Manajemen*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Masyhud, M., Sulthon & Khusnurdilo, Moh, Ed. (2003). *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryono, E. (1999), *Hermenutika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nata, Abudin. (2016). *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Riant (2006) *Kebijakan Publik untuk Negara berkembang; Model-model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodel Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo

Rostow, E.E. (1960) *The Stages of Economic Growth*. Cambridge University Press.